RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NAGAN RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah "Pemberdayaan". Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan.

Sesuai dengan Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional diisyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi wajib menyusun Dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan unruk menyususn Rencana Strategis (Rensra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta dalam penyususnannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Penyusunan Renstra SKPD ini dimaksudkan untuk :

- ✓ Terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan lingkup SKPD
- ✓ Terarahnya sasaran kinerja SKPD
- ✓ Tersedianya pedoman dalam penyususnan rencana kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun LAKIP SKPD.

Terkait dengan maksud penyususnan Renstra diatas, maka SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Bererncana Kabupaten Nagan Raya (BPMPKB) sebagai bagian dari system pemban

gunan yang berfungsi mengawal pemberdayaan tentunya akan mengarahkan Renstranya pada pencapaian pemberdayaan masyarakat yaitu Kemandirian. Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) BPMPKB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 -2019 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki BPMPKB Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2014 -2019 Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra BPMPKB Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi BPMPKB Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan BPMPKB untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur BPMPKB Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPMPKB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 -2019 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja BPMPKB Kabupaten Nagan Raya.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BPMPKB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 - 2019, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Grafik 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

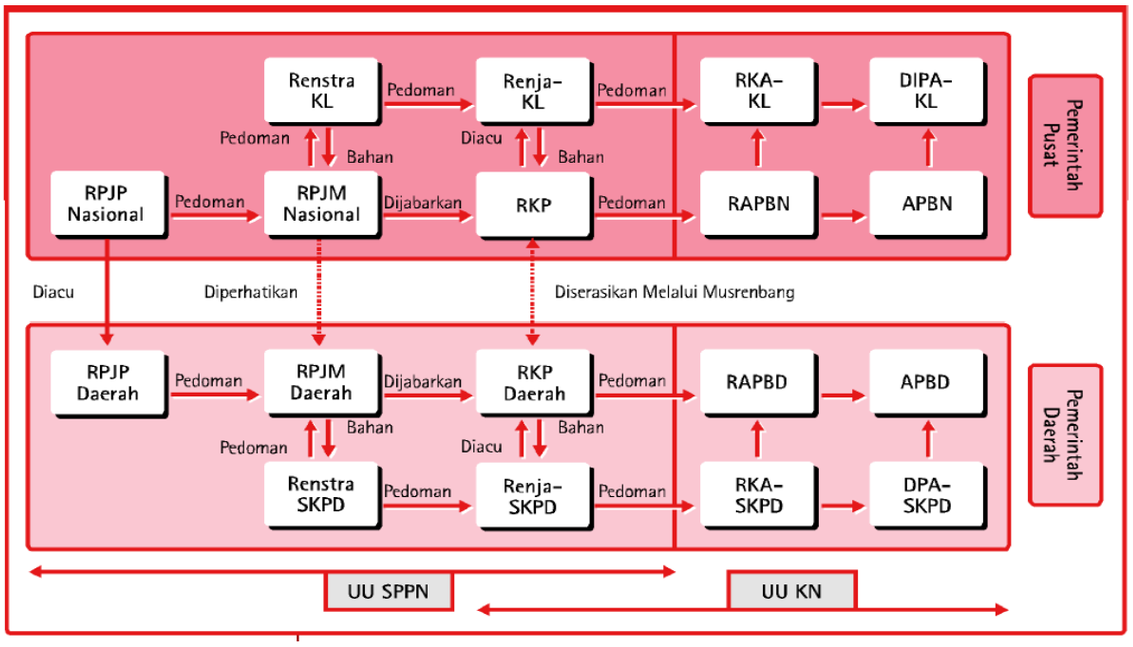

Catatan

Diacu : Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedoman : Hal-hal yang memberikan arah dan koridor

E. Sistematika Penulisan

Renstra BPMPKB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum BPMPKB

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Strategi

D. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Bappeda

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BPMPKB KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat yang dibentuk berdasarkan Qanun Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 termasuk dengan Instansi Lainnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun dengan perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang, diperlukan adanya Lembaga Pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Bererncana terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
    2. Sub Bidang Perlindungan Anak
e. Bidang Keluarga Bererncana, membawahi :
    1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
    2. Sub Bidang Prasarana dan Saran

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 69 orang terdiri dari 34 orang pegawai negeri sipil dan 35 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebesar 54,83 persen berpendidikan Sarjana, 6,45 persen pasca sarjana dan selebihnya berkualifikasi Diploma dan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 75 persen berpendidikan SLTA dan sisanya berpendidikan sarjana dan SLTP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	2 Orang
Strata 1	28 Orang
Diploma III	15 Orang
SLTA	22 Orang
SLTP	2 Orang
JUMLAH	69 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	6 Orang
III	20 Orang
II	8 Orang
I	-
JUMLAH	34 Orang

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	17 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	16 Orang
SLTP	2 Orang
JUMLAH	36 Orang

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2004 dan hanya sedikit yang dihibahkan oleh lembaga donor/LSM. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	2 Unit	
	- Kenderaan Roda 2	15 Unit	2004-2008
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket	2004-2008
4	Alat Studio		
	- Handy Cam	2 Unit	2004-2008
	- Kamera Digital	4 Unit	2004-2008
	- Sound System	1Paket	2004-2008
5	Komputer PC	11 Unit	2004-2008
6	Laptop	8 Unit	2004-2008
7	Mesin Tik	2 Unit	2004-2008
8	Meja Kerja dan Kursi Kerja	40 Set	2004-2008
9	Kursi Rapat	150 Unit	2004-2008
10	Meja dan Kursi Tamu	2 Unit	2004-2008

C. Tugas dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan Tugas Umum Pemerintahahn dan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuang dengan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Urusan Ketatausashaan dan Rumah Tangga BAdan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Keluarga Berencana
b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang
c. Penyusunan dan Perumusan Kebijakam Tehnis dibidang Pemberdayaan Masyaraka,Perempuan dan Keluarga Berencana.
d. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
e. Penyusunan Program dan Pelaksanaan program rintisan Pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi dan Aktifitas Lanjut
f. Peningkatan Kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan terutama dibidang ekonomi, politik, pendidikan dan social budaya serta lingkungan

g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat termasuk upaya perempuan kelembagaan untuk kemajuan Perempuan dan KEluarga Berencana Sejahtera Meliputi Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
i. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana
j. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan Tugasnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

A. Kondisi Umum SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya Berkedudukan sebagai Unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

2.1 VISI DAN MISI

1. V i s i

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang dilaksanakan untuk dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis kedepan yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Sehigga dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terarah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai arah dan kebijakan pembangunan.

Untuk mencapai suatu kondisi sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan Visinya, yaitu : **“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat “** Dengan mendorong kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat termasuk kelembagaan.

2. M i s i

Berdasarkan visi yang telah dirumuskan diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan Misinya sebagai berikut : Mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, sehinggan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, yang dilaksanakan melalui :

a. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan lembaga kemasyarakatan secara efektif dan efisien.
b. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang islami
c. Peningkatan Perlindungan Kekerasan terhadap perempuan dan anak
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
e. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

g. Pengembangan Keluarga Berencana secara efektif.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya melalui analisis SWOT. SWOT merupakan proses analisa berpikir strategis. Terdapat empat quadran yang menjadi bahan pertimbangan sebelum kita menentukan tujuan, yakni :

a. Unsur dari dalam organisasi

1. Strengths (kekuatan)

Semua unsur yang merupakan kekuatan yang dimiliki organisasi seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kekuatan harus digunakan untuk mencapai tujuan.

2. Weaknesses (kelemahan)

Semua unsur yang merupakan kelemahan yang ada pada organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan seperti : dana, sumber daya, budaya, kemampuan.

Kelemahan harus dikurangi jika mungkin dihentikan.

b. Unsur dari luar organisasi

3. Opportunities (peluang)

Semua unsur yang merupakan peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Peluang harus dapat digali dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

4. Threats (tantangan)

Semua unsur yang dapat menghalangi organisasi untuk mencapai tujuan seperti : penemuan baru, pengaruh globalisasi, informasi, perubahan peraturan, akibat politik, perubahan musim.

Analisis terhadap lingkungan internal BPMPKB Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Komitmen pimpinan tinggi

Kelemahan (weaknesses)

1. Jumlah pegawai mencukupi
2. SDM aparatur dan pengendalian masih rendah
3. Sarana kerja yang memadai
4. Eselonering yang masih sama dgn SKPD lain

5. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi
6. Kurangnya data base perencanaan

Analisis terhadap lingkungan eksternal BPMPKB Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan dari lembaga donor
2. Adanya dukungan KDH
3. Adanya regulasi tentang perencanaan pembangunan
4. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi

Tantangan (threat)

1. Regulasi perencanaan yang sering berubah
2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pemberdayaan masih rendah
3. Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemberdayaan dari SKPD

Pencermatan Lingkungan Strategis adalah untuk mencermati tentang ”kekuatan” dan ”Kelemahan” internal, ” Tantangan dan Peluang” eksternal Bappeda Kabupaten Nagan Raya, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Tabel 4.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLI
Kekuatan (Strengths)	**Peluang (Oportunities)**
1. Jumlah pegawai mencukupi 2. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Sarana kerja yang memadai 4. Komitmen pimpinan yang tinggi	1. Adanya dukungan dari lembaga donor 2. Adanya dukungan KDH 3. Adanya regulasi tentang pemberdayaan 4. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi
Kelemahan (Weaknesess)	**Tantangan (Threats)**
1. SDM aparatur di bidang perencanaan dan pengendalian masih rendah 2. Eselonering yang masih sama dgn SKPD lain 3. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi 4. Kurangnya data	1. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD 2. Regulasi pemberdayaan yang sering berubah 3. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masih rendah 4. Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dari SKPD

Tabel 4.2

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

External / Internal		Opportunities		Threats
	1.	Adanya regulasi tentang pemberdayaan	1.	Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi dan dari SKPD
	2.	Adanya dukungan dari lembaga donor		
	3.	Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan teknologi	2.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pemberdayaan masih rendah
	4.	Adanya dukungan KDH	3.	Regulasi perencanaan dan pelaksanaan yang sering berubah
			4.	Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD
Strenghts		**(SO)**		**(ST)**
1. Jumlah pegawai mencukupi	1.	Menggunakan iptek dalam pelaksanaan tupoksi BPMPKB	1.	Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD
2. Tugas pokok dan fungsi yang jelas	2.	Meningkatkan kinerja Bappeda melalui dukungan KDH	2.	Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program pembangunan
3. Komitmen pimpinan yang tinggi	3.	Meningkatkan kapasitas pegawai melalui kerjasama dengan lembaga donor	3.	Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
4. Sarana kerja yang memadai	4.	Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor	4.	Komitmen pimpinan
	5.	Memaksimalkan fungsi BPMPKB sebagai lembaga pemberdayaan		

					dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dari analisis faktor internal dan eksternal diatas, ada empat strategi dasar yang digunakan meliputi :

1. **Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,** terdiri dari :
   a. Menggunakan iptek dalam pelaksanaan tupoksi Bpmpkb
   b. Meningkatkan kinerja BPMPKB melalui dukungan KDH
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui kerjasama dengan lembaga donor
   d. Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor
   e. Memaksimalkan fungsi BPMPKB sebagai lembaga perencana daerah dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi

2. **Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan,** terdiri dari :
   a. Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dari SKPD
   b. Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program pembangunan
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan program dan penganggaran
   d. Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang

3. **Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari :**
   a. Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment
   b. Melakukan identifikasi bentuk reward and punishment yang akan diberikan
   c. Melakukan kerjasama dengan donor dalam meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pemberdayaan
   d. Meningkatkan kerjasama dengan donor dalam kualitas database perencanaan dengan menggunakan sistem IT
   e. Memanfaatkan dukungan KDH dalam melakukan koordinasi dengan SKPD

4. **Mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari :**
   a. Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya
   b. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
   c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam meningkatkan kualitas database perencanaan
   d. Melakukan pendekatan informal dalam meningkatkan koordinasi dengan SKPD

A. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan . Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka BPMPKB Kabupaten Nagan Raya dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan BPMPKB Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur dan memberdayakaanya
4. Menghasilkan data/informasi pembangunan dan pemberdayaan yang akurat
5. Mewujudkan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga
6. Mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan
7. Menyusun program pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan pembangunan strategi jangka panjang, menengah dan tahunan serta menigkatkan fungsi koordinasi antar dinas dan instansi.

B. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang

akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi BPMPKB Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama pemberdayaan dan keberdayaan
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur BPMPKB
7. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan

C. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh B Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Mendorong keterlibatan dunia usaha, stake holder dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perencan

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2007.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan BPM P & KB adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   - 1.5. Penyediaan Jasa Admimistrasi Keuangan
   - 1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - 1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   - 1.14. Pelaksanaan Hari Besar Islam Lainnya
   - 1.15. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainnya
   - 1.16. Penunjang Tuga Pokok Dinas/Badan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   - 2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
   - 2.3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
   - 2.4. Pengadaan Perlengkapan Kantor
   - 2.5. Pengadaan Mobileur
   - 2.6. Penyediaan JAsa Sewa Rumah Jabatan/Dinas
   - 2.7. Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya

2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.11. Pemeliharaan Rytin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
2.12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
   3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya
   3.2. Pengadaan Pakaian Kopri
   3.3. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
   3.4. Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. Peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
   4.1. Perlombaan Desa/Gampong
   4.2. Sheering Program Pengembangan Kecamatan
   4.3. Bulan Bhakti Gotong Royong
   4.4. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
   4.5. Pembinaan Administrasi PKK Gampong
   4.6. Sheering Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)
   4.7. Bantuan Penunjang PArtisipasi Pembangunan Masyarakat Gampong (BP3MG)

A. Program

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kebijaksanaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, disusun program kerja lima tahunan. Penjabaran dari program kerja lima tahunan ditetapkan program kerja tahunan, dimana program untuk tahun kerja 2012 meliputi :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Disipilin Aparatur
d. Program Peningkatan Penegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
g. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
h. Program peninggkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
i. Program Keluarga Berenacana
j. Program Peningkatan peran Aktif dalam Memberdayakan Masyakat Gampong

B. Kegiatan

Pelaksanaan program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2012 diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, secara rinci sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Makanan dan Minuman
i. Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya
j. Pelaksanaan Hari Besar Islam dan Lainnya
k. Pelaksanaan Kedharmawanita wanitaan SKPK
l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainnya
m. Cost shering PAP Satker (PNPM-MPd)
n. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
o. Sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perrmpuan dan perlidungan anak (P2TP2A)
p. Peringatan hari anak nasional dan hari ibu
q. Penbinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI, GAMMAWAR & NAKERWAN
r. Operasional PPKBD,SUB PPKBD
s. Rehabilitasi Sedang berat/berat rumah gedung kantor
t. Pengadaan Perlengkapan Prasaranan KB
u. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kenderaan Dinas/Oprasional
v. Penyusunan RKA , DPA dan DPPA
w. Peningkatan Kapsaitas dan Jaringan Kelembangaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
x. Perlombaan Desa/Gampong
y. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
z. Gelar Tehnologi Tepat Guna (TTG) VIII Tingkat Provinsi NAD

BAB VI
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang BPM P & KB Kabupaten Nagan Raya.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NAGAN RAYA

dto

H.EFFENDI,SE
NIP.196004011981031007